



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, daerah diberikan dana alokasi khusus nonfisik;
- b. bahwa dana alokasi khusus nonfisik diberikan kepada pemerintah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. bahwa untuk menguraikan rencana dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (8) huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan daerah penerima dan rincian dana alokasi khusus nonfisik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rincian Anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6735);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Rincian Anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. melaksanakan kegiatan* dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
- c. menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN
ANGGARAN 2022

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
1	Provinsi Aceh	Provinsi Aceh	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
2	Provinsi Aceh	Kab. Bireuen	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
3	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
4	Provinsi Aceh	Kota Sabang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
5	Provinsi Aceh	Kota Langsa	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
6	Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
7	Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
8	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
9	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
10	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
11	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
12	Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
13	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
14	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
15	Provinsi Sumatera Utara	Kota Sibolga	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
16	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
17	Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
18	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
19	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
20	Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
21	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
22	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
23	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
24	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
25	Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
26	Provinsi Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
27	Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
28	Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
29	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
30	Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
31	Provinsi Riau	Provinsi Riau	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
32	Provinsi Riau	Kab. Bengkalis	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
33	Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
34	Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
35	Provinsi Riau	Kab. Kampar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
36	Provinsi Riau	Kab. Pelalawan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
37	Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
38	Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
39	Provinsi Riau	Kab. Siak	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
40	Provinsi Riau	Kota Dumai	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
41	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
42	Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
43	Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
44	Provinsi Jambi	Kab. Batang Hari	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
45	Provinsi Jambi	Kota Jambi	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
46	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
47	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
48	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
49	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
50	Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
51	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
52	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
53	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
54	Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
55	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
56	Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
57	Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
58	Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
59	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
60	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
61	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
62	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
63	Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
64	Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
65	Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
66	Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
67	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
68	Provinsi Lampung	Kota Metro	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
69	Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
70	Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
71	Provinsi Lampung	Kab. Mesuji	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
72	Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
73	Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
74	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
75	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
76	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
77	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
78	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
79	Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
80	Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
81	Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
82	Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
83	Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
84	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
85	Provinsi Jawa Barat	Kota Depok	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
86	Provinsi Jawa Barat	Kota Sukabumi	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
87	Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
88	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
89	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
90	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
91	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
92	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
93	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
94	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
95	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
96	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
97	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
98	Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
99	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
100	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
101	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
102	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
103	Provinsi Jawa Tengah	Kota Tegal	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
104	Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
105	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
106	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
107	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
108	Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
109	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
110	Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
111	Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
112	Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
113	Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
114	Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
115	Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
116	Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
117	Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
118	Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
119	Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
120	Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
121	Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
122	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
123	Provinsi Jawa Timur	Kota Kediri	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
124	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
125	Provinsi Jawa Timur	Kota Mojokerto	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
126	Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
127	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
128	Provinsi Jawa Timur	Kota Batu	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
129	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
130	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
131	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
132	Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
133	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
134	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
135	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
136	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
137	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
138	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
139	Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
140	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
141	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
142	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
143	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
144	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
145	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
146	Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
147	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
148	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
149	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
150	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
151	Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
152	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
153	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
154	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
155	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
156	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
157	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
158	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
159	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
160	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
161	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
162	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
163	Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
164	Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
165	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
166	Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
167	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
168	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
169	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
170	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
171	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
172	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
173	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
174	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
175	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
176	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare-pare	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
177	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
178	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
179	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
180	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
181	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
182	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-bau	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
183	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
184	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
185	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
186	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
187	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
188	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
189	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
190	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
191	Provinsi Bali	Provinsi Bali	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
192	Provinsi Bali	Kab. Gianyar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
193	Provinsi Bali	Kab. Karangasem	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
194	Provinsi Bali	Kab. Tabanan	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
195	Provinsi Bali	Kota Denpasar	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
196	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
197	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
198	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
199	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
200	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
201	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
202	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
203	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
204	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
205	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
206	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
207	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
208	Provinsi Maluku	Provinsi Maluku	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
209	Provinsi Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
210	Provinsi Maluku	Kab. Buru	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
211	Provinsi Maluku	Kota Tual	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
212	Provinsi Papua	Provinsi Papua	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
213	Provinsi Papua	Kab. Keerom	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
214	Provinsi Papua	Kab. Asmat	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
215	Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						Total
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	
		Utara							
216	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
217	Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
218	Provinsi Banten	Provinsi Banten	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
219	Provinsi Banten	Kab. Lebak	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
220	Provinsi Banten	Kab. Pandeglang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
221	Provinsi Banten	Kab. Serang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
222	Provinsi Banten	Kota Cilegon	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
223	Provinsi Banten	Kota Tangerang	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
224	Provinsi Banten	Kota Serang	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
225	Provinsi Banten	Kota Tangerang Selatan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
226	Provinsi Bangka Belitung	Provinsi Bangka Belitung	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
227	Provinsi Bangka Belitung	Kab. Bangka	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
228	Provinsi Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
229	Provinsi Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
230	Provinsi Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
231	Provinsi Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
232	Provinsi Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
233	Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
234	Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
235	Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
236	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
237	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
238	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Karimun	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
239	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
240	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
241	Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
242	Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
243	Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
244	Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
245	Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
246	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Provinsi	Nama Daerah	ALOKASI DAK 2022						
			BOPPA Pelayanan (58%)	Target Output (Korban)	BOPPA Pencegahan (25%)	Target Output (Kegiatan)	BOPPA Manajemen (17%)	Target Output (Kegiatan)	Total
247	Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
248	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	175.044.000	19	75.450.000	7	51.306.000	3	301.800.000
249	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan	349.044.000	40	150.450.000	13	102.306.000	3	601.800.000
250	Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	262.044.000	27	112.950.000	10	76.806.000	3	451.800.000
TOTAL			69.600.000.000	7.466	30.000.000.000	2.641	20.400.000.000	750	120.000.000.000

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

